

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah Indonesia telah dan sedang mengimplementasikan model struktur kekuasaan (otoritas) dan rancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang baru. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja yang dalam penyusunannya harus dengan model anggaran partisipatif. Dalam model APBD berbasis kinerja, struktur kekuasaan penyusunan APBD tidak hanya bergantung pada kepala daerah (sistem tersentralisasi) tetapi harus didasarkan pada kekuasaan yang lebih bawah yaitu pimpinan badan, dinas, kantor dan unit-unit lainnya (sistem terdesentralisasi).

Riset tentang pengaruh kekuasaan dan politik pada perilaku organisasional bukanlah hal baru (Cyert & March, 1963; Hardy & Clegg, 1999; Perrow, 1986; Pfeffer, 1992 dalam Syafrudin, 2006). Kemudian dalam literatur akuntansi, Sistem Kontrol Manajemen (SKM) dirancang dan digunakan untuk meligitimasi dan menjaga otoritas/kekuasaan (*power*) termasuk bagaimana melakukan distribusi kekuasaan yang optimal pada pelaku-pelaku organisasi (Abernathy & Chua, 1996; Covaleski & Dirsmith, 1986; Kurunmaki, 1999 dalam Syafrudin, 2006). Meskipun dalam penelitian tentang SKM atau pengaruh kekuasaan pada kinerja organisasi masih terbatas.

Model rancangan SIKD sebelum periode 2002 merupakan model SIKD berbasis pada model kekuasaan yang tersentralisasi, karena hampir semua keputusan penganggaran SIKD merupakan keputusan kepala daerah sebagai pengguna SIKD. Sedangkan model SIKD sesudah periode 2002 merupakan model kekuasaan yang terdesentralisasi, dimana pengguna utama SIKD yaitu kepala daerah telah mewajibkan para manajer pemerintah (perangkat) daerah (kepala badan, kantor, dinas dan unit-unit lainnya) untuk menggunakan SIKD, karena kepala daerah bukan satu-satunya pengambil keputusan penganggaran, namun telah didistribusikan ke unit-unit yang lebih bawah.

Penerapan SIKD pada pemerintahan berfokus pada efisiensi dan efektifitas penggunaan dana yang telah dianggarkan. Penghematan menggunakan anggaran sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa besar anggaran yang bisa dihemat. Sehingga manajemen keputusan dapat mengambil keputusan penganggaran untuk kegiatan berikutnya.

Pimpinan SKPD yang menjadi tolak ukur dalam birokrasi pemerintahan, menjadikan peran kontrol keputusan dan manajemen keputusan sangat penting, diantaranya dalam hal penggunaan anggaran. Pimpinan SKPD diharuskan mampu mengendalikan, mengawasi dan bertanggungjawab terhadap seluruh biaya yang terjadi dalam suatu unit kerja. Dengan demikian pimpinan SKPD dapat mengontrol perilaku bawahan serta mengambil keputusan secara tepat. Perilaku tersebut menjadikan pimpinan SKPD dituntut untuk memperhatikan anggaran yang digunakan, sehingga kepedulian *cost* dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Syafrudin (2006). Penelitian Syafrudin (2006) menggunakan data di kabupaten Kudus sedangkan penelitian ini data di kabupaten Magetan. Alat uji yang digunakan Syafrudin (2006) menggunakan SEM dengan *software* LISREL, sedangkan pada penelitian ini menggunakan SEM dengan *software* PLS (*partial Least Square*).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kewenangan formal berpengaruh positif terhadap kontrol keputusan?
2. Apakah kewenangan formal berpengaruh positif terhadap manajemen keputusan (realisasi APBD)?
3. Apakah Kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap kontrol keputusan?
4. Apakah kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap manajemen keputusan (realisasi APBD)?
5. Apakah karakteristik SIKD berpengaruh positif terhadap kontrol keputusan?
6. Apakah karakteristik SIKD berpengaruh positif terhadap manajemen keputusan (APBD)?
7. Apakah penggunaan SIKD untuk kontrol keputusan berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*?
8. Apakah penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*?

9. Apakah struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*?
10. Apakah struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap *cost Consciousness*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa:

1. Kewenangan formal berpengaruh positif terhadap kontrol keputusan.
2. Kewenangan formal berpengaruh positif terhadap manajemen keputusan (realisasi APBD).
3. Kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap kontrol keputusan.
4. Kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap manajemen keputusan (realisasi APBD).
5. Karakteristik SIKD berpengaruh positif terhadap kontrol keputusan.
6. Karakteristik SIKD berpengaruh positif terhadap manajemen keputusan (APBD).
7. Penggunaan SIKD untuk kontrol keputusan berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*.
8. Penggunaan SIKD untuk manajemen keputusan berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*.
9. Struktur kewenangan formal berpengaruh positif terhadap *cost consciousness*.

10. Struktur kewenangan informal berpengaruh negatif terhadap *cost Consciousness*.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Manfaat yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah adalah memberikan gambaran hasil penelitian tentang faktor yang mendorong efektifitas penggunaan anggaran pada pemerintahan daerah di setiap SKPD. Khususnya dilingkup pemerintahan kabupaten Magetan.

2. Kontribusi Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengelolaan keuangan secara efektifitas dan efisiensi pada organisasi sektor publik di pemerintahan daerah.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Bagian utama dalam penulisan laporan skripsi terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan membahas tentang masing-masing sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian membahas tentang tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis membahas tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III. METODA PENELITIAN

Pada bab III ini membahas tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data serta teknis analisis.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV membahas tentang data penelitian, hasil penelitian, pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab V membahas tentang simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan pada bab IV dan saran.